

TESIS

**URGENSI FORMULASI SANKSI
TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK
MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL**



Oleh

ELITA INAS PUTRIHARTIWI

NIM. 2420215320161

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

TESIS

**URGENSI FORMULASI SANKSI
TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK
MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL**



Oleh

ELITA INAS PUTRIHARTIWI

NIM. 2420215320161

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA
YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

ELITA INAS PUTRIHARTIWI

NIM. 2420215320161

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

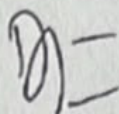
**JUDUL : URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG
TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL**

NAMA : ELITA INAS PUTRIHARTIWI

NIM : 2420215320161

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

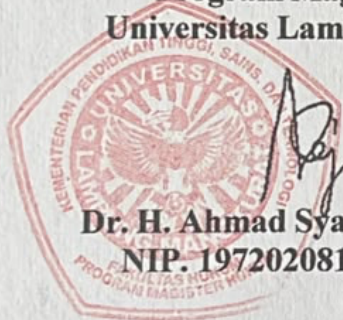
Pembimbing



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



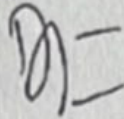
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

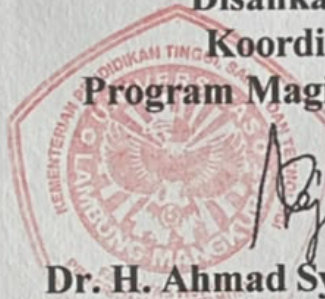
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

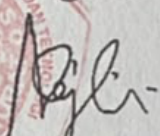
Pembimbing



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**




**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 02 Juli 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ia harus sanggup menahan perihnya kebodohan. (Imam Al-Syafi'i)"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Untuk Suamiku Tercinta, R. Senja Raifiesha, dan Putraku Tersayang, Adipati Cakrawala Senja

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk suamiku tercinta, R. Senja Raifiesha, yang senantiasa menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan penyemangat dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas doa, pengertian, kesabaran, serta dukungan yang tak pernah putus, bahkan di tengah jarak dan kesibukan yang sering menyertai perjalanan kita. Setiap pengorbanan, perhatian, dan kasih sayangmu menjadi energi yang menguatkan untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini.

Untuk putraku tersayang, Adipati Cakrawala Senja, terima kasih telah menjadi cahaya dan kebahagiaan dalam hidup Ammi. Maafkan waktu-waktu yang harus Ammi bagi untuk belajar, menulis, dan menyelesaikan tesis ini. Senyummu selalu menjadi pengingat bahwa setiap lelah dan perjuangan ini memiliki tujuan yang indah. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

Semoga keberhasilan ini menjadi bagian kecil dari kebahagiaan yang dapat kuberikan untuk kalian berdua.

Untuk Mama dan Bapak Tercinta

Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada Mama dan Bapak yang senantiasa mendoakan dan mendukungku dari jauh di Semarang. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupanku. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang telah Mama dan Bapak berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Mama dan Bapak.

Untuk Mama dan Abah Mertua

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama dan Abah yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan bantuan selama proses perkuliahan ini. Terlebih atas kesediaan Mama dan Abah menjaga dan merawat Adipati ketika tugas kuliah dan penyusunan tesis menyita banyak waktuku. Kebaikan dan ketulusan yang diberikan menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Mama dan Abah dengan keberkahan yang berlipat ganda.

Untuk Adik-Adikku Tersayang, Kamila dan Wiyan

Terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penghibur di tengah lelah dan penatnya perjalanan studi ini. Semoga ikatan kasih sayang dan kebersamaan kita senantiasa terjaga, serta Allah SWT memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan kita.

Dosen Pembimbing Tesis, Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elita Inas Putrihartiwi
NIM : 2420215320161
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



ELITA INAS PUTRIHARTIWI

NIM. 2420215320161

PUTRIHARTIWI, ELITA INAS. 2026. URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 144 halaman.

RINGKASAN

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Kehadiran pidana kerja sosial bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan sekaligus mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Namun demikian, pengaturan mengenai pidana kerja sosial masih menyisakan persoalan hukum, khususnya mengenai sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah masih mengandung kelemahan berupa ketidakjelasan kriteria terpidana yang dianggap tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, ketiadaan mekanisme penghitungan sanksi secara proporsional, dan ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penetapan sanksi. Kekosongan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan praktik penegakan hukum, dan mengurangi efektivitas pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan modern.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh formulasi hukum yang ideal terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum pidana Indonesia karena ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas pidana kerja sosial, memunculkan perbedaan praktik dalam pelaksanaannya, serta mengurangi daya paksa putusan pengadilan.
2. Formulasi yang ideal terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah adalah pemberlakuan pidana denda sebagai sanksi pengganti dan bukan sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara tidak sejalan dengan filosofi pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pemenjaraan, sedangkan pidana denda lebih proporsional, konsisten dengan tujuan pembaharuan hukum pidana, serta tetap memberikan konsekuensi hukum kepada terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, kewenangan pemberlakuan dan pelaksanaan

pidana denda tersebut perlu diberikan secara langsung kepada jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tanpa memerlukan penetapan hakim terlebih dahulu.

PUTRIHARTIWI, ELITA INAS. 2026. URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 144 halaman.

ABSTRAK

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Kehadiran pidana kerja sosial mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kriteria terpidana yang dianggap tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, ketiadaan mekanisme penghitungan sanksi secara proporsional, dan ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penetapan ketidakpatuhan.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas pidana kerja sosial, memunculkan perbedaan praktik dalam pelaksanaannya, serta mengurangi daya paksa putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum dalam sistem pemidanaan Indonesia. Formulasi yang ideal adalah pemberlakuan pidana denda sebagai sanksi pengganti terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial dan bukan pidana penjara. Pidana denda dinilai lebih sesuai dengan filosofi pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pemenjaraan serta lebih konsisten dengan tujuan pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, demi menjamin efektivitas pelaksanaan putusan dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, kewenangan pemberlakuan serta pelaksanaan pidana denda perlu diberikan secara langsung kepada jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tanpa memerlukan penetapan hakim.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Sanksi Pidana Denda, Jaksa, Eksekusi Putusan, dan Kepastian Hukum.

PUTRIHARTIWI, ELITA INAS. 2026. THE URGENCY OF FORMULATING SANCTIONS AGAINST CONVICTS FAILING TO COMPLETE COMMUNITY SERVICE ORDERS. Master of Law Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate School, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 144 pages.

ABSTRACT

Community service is one of the forms of criminal law reform introduced under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code as an alternative to short-term imprisonment and minor fines. The introduction of community service reflects a shift in sentencing policy toward a more rehabilitative approach, emphasizing social reintegration and benefits to society. However, there remains no clear legal framework regulating the criteria for determining when a convicted person is deemed to have failed to perform community service without a valid reason, the absence of a proportional sanction-calculation mechanism, and the lack of clarity regarding the allocation of authority in determining non-compliance.

The absence of such regulations has created a legal vacuum that may undermine the effectiveness of community service, lead to inconsistencies in its implementation, and weaken the enforceability of court judgments. Therefore, it is necessary to formulate a regulatory framework capable of ensuring legal certainty while maintaining the effective implementation of community service within the Indonesian criminal justice system.

This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that regulating sanctions against convicted persons who fail to perform community service without a valid reason is urgently required to address the existing legal vacuum within Indonesia's sentencing system. The ideal formulation is the imposition of a fine as a substitute sanction for convicted persons who fail to carry out community service, rather than imprisonment. A fine is considered more consistent with the philosophical foundation of community service as an alternative to incarceration and more aligned with the objectives of Indonesia's criminal law reform. Furthermore, in order to ensure the effective enforcement of court judgments and uphold the principles of a simple, speedy, and cost-efficient judicial process, the authority to impose and execute such fines should be granted directly to the public prosecutor as the executing authority, without requiring prior judicial authorization.

Keywords: *Community Service, Criminal Fine Sanctions, Public Prosecutor, Execution of Judgments, and Legal Certainty.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Bagian Akademik, Staf Perpustakaan**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, terutama kepada Yulia Rahman, Alya Amani, Nur Alivia Febriyani, dan Tiara Wahyu Putri peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

8. Kepada suami tercinta, **R. Senja Raifiesha**, dan putra tersayang, **Adipati Cakrawala Senja**, terima kasih atas doa, cinta, kesabaran, serta dukungan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.
9. Kepada Mama dan Bapak, Mama dan Abah mertua, serta adik-adikku, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan segala bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
10. Kepada seluruh rekan pada **Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarbaru**, terima kasih atas dukungan, pengertian, serta semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini di tengah pelaksanaan tugas kedinasan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 02 Juli 2026



Elita Inas Putrihartiwi, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Teoritis	12
a. Teori Utilitarian	12
b. Teori Efektivitas Hukum	14
2. Tinjauan Konseptual	15
a. Konsep Pidana Kerja Sosial	15
b. Konsep Kebijakan Formulasi Sanksi Pengganti	18
c. Konsep Eksekusi	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Masalah	22
3. Sifat Penelitian	24

4. Tipe Penelitian	24
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	28
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	29

BAB II URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PIDANA KERJA SOSIAL	31
A. Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia	31
B. Problematika Pengaturan Sanksi Terhadap Terpidana Yang Tidak Melaksanakan Pidana Kerja Sosial	45

BAB III FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PIDANA KERJA SOSIAL	65
A. Perbandingan Pengaturan Sanksi Terhadap Terpidana Yang Tidak Melaksanakan Pidana Kerja Sosial	65
B. Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Terhadap Terpidana Yang Tidak Melaksanakan Pidana Kerja Sosial	100

BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025